

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini, telah berkembang berbagai jenis media massa mulai dari media cetak (koran, dan majalah) bahkan sampai media elektronik (radio, televisi dan internet) yang selalu mengalirkan informasi-informasi setiap harinya. Dari bermacam informasi yang disajikan tersebut, ada yang berkesinambungan dan ada yang tidak.

Infomasi yang berkesinambungan itu tentu dalam banyak kasus dapat membentuk pendapat umum. Pendapat umum yang berkembang ini sangat penting bagi praktisi humas. Menjadi penting karena, salah satu fungsi humas adalah memantau pendapat umum. Seperti yang diungkapkan Ardianto (2008: 127), "...dalam aktivitas, *Public Relations* yang menyangkut pendapat umum tersebut merupakan aspek yang penting untuk keberhasilan menciptakan opini publik positif, dan pada akhirnya akan tercipta suatu citra yang baik bagi lembaga atau organisasi yang menjadi tanggung jawabnya".

Pendapat umum atau opini publik merupakan salah satu kekuatan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat menentukan kehidupan sehari-hari suatu bangsa. Opini publik juga merupakan "penghubung" antara kehidupan sosial dan kehidupan politik manusia, juga antara kehidupan sebagai makhluk sosial dan sebagai individu warga negara. Opini publik banyak digunakan

oleh media massa maupun kaum politisi dan pemerintah dalam memperoleh dukungan masyarakat terhadap program kerjanya.

Untuk dapat mengetahui opini publik yang berkembang perlu dilakukan beberapa cara, antara lain dengan *polling* dan monitoring melalui media massa. Menurut kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadaly (Olii dan Erlita, 2011: 76), *polling* berarti menyelidikan pendapat umum, pemungutan suara, jumlah suara. Karena itu, pemungutan opini publik/pengumpulan opini publik atau *public opinion polling* (POP) adalah pengumpulan pendapat dari publik. *Public opinion polling* lebih sering digunakan meramalkan sesuatu yang akan datang seperti hasil pemilihan umum Legislatif atau pemilihan Presiden.

Sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan monitoring media massa, bisa menggunakan media massa elektronik (radio dan televisi) maupun cetak (surat kabar dan majalah). Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi pada surat kabar harian. Surat kabar harian selalu dimonitor, apakah terdapat pemberitaan yang penting seputar opini publik yang berkembang di masyarakat atau pemberitaan lain yang layak untuk diarsipkan, dan kegiatan ini biasa disebut monitoring media.

Monitoring media mempunyai beberapa kegunaan/manfaat, salah satunya adalah sebagai wahana kontrol atas opini publik yang berkembang. Karena dengan memantau pendapat umum, dapat diketahui kedudukan lembaga/organisasi di mata publik. Untuk itulah, humas perlu memantau pendapat umum. Hal ini juga menjadi salah satu fungsi humas, yaitu memantau pendapat umum.

Kegiatan memantau pendapat umum di media massa (monitoring media) diterapkan dalam Kementerian Sekretariat Negara. “Guntingan Pers” adalah sebutan lain dari media monitoring yang biasa digunakan dikalangan *internal* para praktisi humas di Kementerian Sekretariat Negara. Media monitoring Kementerian Sekretariat Negara dilakukan secara rutin setiap harinya secara terstruktur. Informasi yang biasanya dimonitoring adalah informasi yang berkaitan tentang pemerintahan Republik Indonesia, karena Kementerian Sekretariat Negara berfungsi sebagai *Office of the President*/Kepala Pemerintahan.

Kementerian Sekretariat Negara ini, memantau setiap pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan, kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Keputusan Presiden yang dikeluarkan Set-Neg, pendapat-pendapat masyarakat mengenai pemerintahan, hingga pemberitaan mengenai *hot news* (seperti bencana alam, atau kejadian luar biasanya yang menjadi *headline* di media massa).

Untuk itulah, Kementerian Sekretariat Negara membuat beberapa kriteria berita yang layak dimasukkan dalam Guntingan Pers, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitaan Presiden dan Wakil Presiden.
- Pemberitaan Seputar Sekretariat Negara.
- Kebijakan Publik Aktual dan Kementerian.
- Berita Aktual atau *Hot News*.

Di bawah ini, terdapat beberapa pemberitaan yang termasuk dalam kajian monitoring humas Kementerian Sekretariat Negara dan menimbulkan opini publik, sebagai berikut:

Pada Kompas, edisi 19 Oktober 2010 dengan judul "Anggaran Renovasi Bengkang Fitra Melaporkan Renovasi Perumahan DPR ke KPK". Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat menempati rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Oktober 2010 dipastikan gagal karena rumah tersebut belum selesai direnovasi. Dalam renovasi ini diduga terjadi pembengkakan anggaran.

Opini yang berkembang mengenai pemberitaan ini, cenderung ke arah yang negatif. Karena publik digiring untuk melihat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu hidup dalam kemewahan di atas penderitaan banyak rakyat yang masih hidup serba kekurangan.

Pada Rakyat Merdeka, edisi 9 Oktober 2010 dengan judul "93 M Untuk Gelar 5 Kali Perhelatan Internasional". Lebih banyaknya agenda perhelatan internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2011 menimbulkan konsekuensi peningkatan rencana anggaran sebesar Rp. 93 miliar.

Opini yang berkembang mengenai pemberitaan ini, juga cenderung ke arah negatif. Publik akan berfikir bahwa negara Indonesia terlalu menghabiskan anggaran untuk suatu kegiatan/acara tertentu. Padahal tentu saja ada penjelasan mengenai anggaran yang dikeluarkan ini. Secara garis besar dari isi pemberitaan, karena KTT ASEAN ini dihadiri oleh beberapa Kepala Negara yang perlu mendapatkan perlakuan khusus/istimewa dari tuan rumah.

Pada Rakyat Merdeka, edisi 9 Oktober 2010 dengan judul "Anggaran Pidato Presiden SBY 1,9 M Masih Bisa Dinego". Sekretariat Negara menjelaskan, anggaran penyusunan pidato Presiden SBY sebesar Rp. 1,9 miliar bukanlah harga

mati karena masih bersifat usulan rencana anggaran yang dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan penyesuaian.

Dari ketiga contoh pemberitaan yang pernah dimonitoring ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap pemberitaan yang menyangkut dengan kinerja pemerintahan, baik itu Presiden dan Wapres hingga kepada suatu masalah yang menyangkut anggaran negara harus selalu dimonitor. Karena jika sampai media menggiring publik ke arah yang negatif maka, akan merugikan semua pihak baik itu Kementerian Sekretariat Negara bahkan sampai penilaian buruk terhadap kinerja pemerintahan Republik Indonesia.

Di atas merupakan salah satu contoh pemberitaan yang telah dimonitoring oleh Kementerian Sekretariat Negara dan belum lama terdapat isu yang selalu menjadi topik *hangat* pembicaraan di media yaitu tentang *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat kabar yang termasuk dalam kajian monitoring yang memberitakan masalah tersebut, antara lain: Kompas (periode September terdapat 24 berita, Oktober terdapat 28 berita), Media Indonesia (periode September terdapat 23 berita, Oktober 30 berita), Republika (periode September 23 berita, Oktober 32 berita), Koran Tempo (periode September 17 berita, Oktober 43 berita), Jurnal Nasional (periode September 25 berita, Oktober 41 berita), Rakyat Merdeka (periode September 48 berita, Oktober 78 berita).

Penulis melihat kecenderungan pemberitaan yang paling banyak mengenai *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II pada Harian Rakyat Merdeka. Maka itu, penulis membatasi pemberitaan *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II pada

Harian Rakyat Merdeka dan di bawah ini, penulis akan memaparkan beberapa pemberitaannya.

Pada edisi 17 September 2011 dengan judul "SBY Segera Evaluasi Kinerja Menteri, Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Presiden". Presiden akan mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dilengkapi dengan laporan kerja dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 akan memberikan *updating* laporan berdasarkan apa yang dicapai dan prestasi dari tiap kementerian. Hal itu yang menjadi dasar Presiden menilai masing-masing kementerian.

Pada edisi 18 September 2011 dengan judul "Tidak Usah Ribut Reshuffle, Presiden Saja Tutup Mulut". Isu Reshuffle ini jauh panggang dari api, alias jauh dari kenyataan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan orang-orang dekat SBY yang tidak pernah secara tegas menyatakan, kapan Reshuffle akan terjadi, semua masih dalam tahap evaluasi dan menunggu masukan rakyat.

Pada edisi 19 September 2011 dengan judul "Tidak Memuaskan Belum Tentu Buruk". Kabar Reshuffle dari Istana semakin terang. Staf khusus presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparinga menegaskan pertimbangan dalam melakukan perubahan susunan kabinet tidak datang karena desakan atau yang datang dari ruang-ruang publik (desakan survey). Faktor utamanya adalah keperluan untuk melakukan hasil akselerasi perubahan kementerian yang dinilai kinerjanya tidak memuaskan belum tentu buruk, dan menteri-menterinya layak dicopot. Dia meminta publik menunggu sekitar 2-3 pekan untuk kepastian Reshuffle Kabinet.

Reshuffle dicanangkan optimisme publik terhadap pemerintah untuk bangsa, bukan untuk pencitraan. Kalau ada Reshuffle masyarakat sadar dan bilang, oh pemerintahnya masih ada. Sebaliknya, kalau tidak ada Reshuffle, masyarakatnya bisa beranggapan pemerintah tidak bekerja bahkan tidak ada.

Pada edisi 20 September 2011 dengan judul "Pernyataan Stafsuspres Dr. Daniel Sparingga, SBY-Boed Bicarakan Nama Menteri Baru". Tanda-tanda Reshuffle Kabinet sudah bukan samar-samar lagi. Staf khusus presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparingga menyatakan saat ini, diantara Persiden dan Wakil Presiden sudah ada pembicaraan tentang nama menteri dan atau penggantinya. Yang menjadi perhatian besar presiden saat ini adalah langkah strategis agar perubahan lebih cepat terjadi. Dan, salah satu upayanya adalah perubahan kabinet.

Penulis menyimpulkan pada edisi 17, 18, 19, 20 September 2011 merupakan awal dari isu Reshuffle yang berkembang. Dari beberapa pemberitaan yang disajikan oleh Rakyat Merdeka tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II dapat kita lihat gejala yang muncul pada isu Rehuffle.

Adanya perombakan kabinet pada awalnya masih merupakan sebuah rumor yang beredar, namun semakin lama Presiden pun mengevaluasi kinerja para menteri dalam kabinetnya yang ternyata tidak memuaskan, akhirnya timbul *buah* pemikian untuk mengadakan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II yang berfokus pada akselerasi, yang dilakukan tidak hanya menggeser atau menggusur orang, namun juga membawa serta cara pandang baru, komitmen baru, semangat baru, dan orientasi baru.

Isu Reshuffle bisa menjadi semacam alat buat presiden mengukur siapa yang ambisius, dan siapa yang degup jantungnya untuk rakyat. Isu ini melahirkan opini publik yang berkembang di masyarakat dan sebagian besar menganggap Reshuffle Kabinet ini masih banyak unsur kepentingan politis.

Pemberitaan ini, berdampak cukup besar bagi lembaga salah satunya untuk menemukan permasalahan (isu) dan titik kecenderungan permasalahan isu yang baik atau sebaliknya berkaitan dengan kegiatan monitoring dan permasalahan yang sering dimonitor oleh humas Kementerian Sekretariat Negara, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: "sejauhmana isu yang berkembang dan cenderung ke arah mana isu yang muncul tersebut?"

## **1.2. Masalah Penelitian**

Dari latar belakang diperoleh gambaran dari harian Rakyat Merdeka yang *intens* memberitakan mengenai Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, ada gejala isu dan arah isu mengenai Reshuffle Kabinet yang beragam di surat kabar harian tersebut.

Untuk mengetahui secara pasti isu dan arah isu tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di harian Rakyat Merdeka perlu dilakukan penelitian *intens*. Dalam kaitan itu, penulis merumuskan permasalahan:

**"Bagaimana *Trend Isu* dan *Trend Arah Isu* mengenai Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di Harian Rakyat Merdeka periode September–Oktober 2011?"**



### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui *trend* isu melalui pemberitaan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di harian Rakyat Merdeka.
2. Mengetahui *trend* arah isu melalui pemberitaan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di harian Rakyat Merdeka.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tentang *trend* isu dan arah isu pemberitaan mengenai *Reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II ini antara lain:

1. Manfaat teoritis. Dalam penelitian ini untuk memberi kontribusi atau masukan pada konsep dan teori Pendapat Umum.
2. Manfaat praktis. Sebagai bahan evaluasi bagi humas Kementerian Sekretariat Negara mengenai kedudukan lembaganya di mata publik eksternal.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, menguraikan desain penelitian, unit analisis, populasi dan sampel, kategori dan definisi kategori, reliabilitas kategori, dan analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, menguraikan hasil penelitian mengenai *trend* isu dan arah isu mengenai Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di harian Rakyat Merdeka. Dan pembahasan hasil penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.